

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGROUPING DI SD NEGERI CUKILAN 01 KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

Muntianah¹, Sunandar², Ngurah Ayu Nyoman Murniati²

¹⁾ SD N Cukilan 01

²⁾ Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa dilaksanakan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang?, (2) bagaimana mekanisme pelaksanaan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh?, (3) apa efektifitas pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh?, (4) apa efisiensi pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh?, (5) bagaimana dampak kebijakan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui latar belakang dilaksanakan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, (2) untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh, (3) Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh, (4) Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh, (5) untuk mengetahui dampak kebijakan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat informatif dengan menggunakan metoda diskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah triangulasi data dan *member checking*.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa latar belakang dilaksanakannya regrouping di SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 adalah: (1) kedua sekolah tersebut berada dalam satu wilayah, (2) kondisi beberapa ruang kelas yang rusak baik di SD Cukilan 01 maupun di SD Negeri Cukilan 02, (3) jumlah siswa yang cenderung menurun terutama di SD Negeri Cukilan 02, (4) kurangnya tenaga pendidik di SD Negeri Cukilan 02.

Mekanisme pelaksanaan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 060/ U/2012 tentang pedoman pendirian sekolah pada pasal 26. Adapun tahapan tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 meliputi pendataan, sosialisasi, penetapan, dan penyatuhan sekolah.

Efektifitas pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 setelah dilaksanakan *regrouping* meliputi: (1) pemeliharaan dan perawatan gedung, (2) pelayanan bagi siswa, (3) pengelolaan sarana dan prasarana, (4) partisipasi masyarakat, (5) penyatuhan budaya sekolah.

Efektifitas pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 setelah dilaksanakan regrouping meliputi: (1) pemanfaatan gedung yang ditinggalkan, (2) kepemimpinan kepala sekolah, (3) pengelolaan tenaga kependidikan, (4) pengelolaan keuangan, (5) kedudukan komite.

Dampak *regrouping* bagi peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 meliputi: (1) dampak bagi siswa tampak adanya hubungan sosial yang lebih akrab, meningkatnya prestasi siswa baik akademis maupun non akademis,

(2) dampak bagi guru tampak pada hubungan kekeluargaan antar guru yang lebih akrab, iklim kerja lebih menyenangkan dan guru lebih berinovasi, (3) dampak bagi masyarakat tampak adanya penyelenggaraan PAUD, pendirian Musholla Nurul Huda dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dan mekanisme pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 telah sesuai dengan peraturan yang ada. Efektifitas, efisiensi serta dampak adanya *regropuping* di SD Negeri Cukilan 01 telah sesuai dengan harapan.

Kata kunci : kebijakan, penggabungan (*regrouping*)

ABSTRACT

The problems in this study are: (1) why is regrouping at Cukilan Public Elementary School 01 Suruh District Semarang District ?, (2) how is the mechanism for implementing regrouping in Cukilan Public Elementary School 01 Suruh District? 01 Suruh Subdistrict ?, (4) what is the efficiency of education management in Cukilan Public Elementary School 01 Suruh Subdistrict ?, (5) how is the impact of the regrouping policy in Cukilan Public Elementary School 01 Suruh District ?.

The objectives of this study were: (1) to determine the background for regrouping at Cukilan Public Elementary School 01, Suruh District, Semarang Regency, (2) to find out the mechanism for implementing regrouping at Cukilan Public Elementary School 01, Suruh District, (3) To determine the effectiveness of managing education in elementary schools Negeri Cukilan 01 Suruh Subdistrict, (4) To find out the efficiency of education management in Cukilan Public Elementary School 01 Suruh District, (5) to find out the impact of the regrouping policy in Cukilan Public Elementary School 01 Suruh District.

This research is an informative qualitative research using descriptive methods. The data analysis technique used is data triangulation and checking members.

From the results of the study, it can be seen that the background of implementing regrouping at Cukilan Elementary School 01 and Cukilan 02 Public Elementary School is: (1) the two schools are in one area, (2) the condition of some damaged classrooms both at Cukilan Elementary School 01 and in elementary school Negeri Cukilan 02, (3) the number of students tends to decline, especially in SD Negeri Cukilan 02, (4) the lack of educators in SD Negeri Cukilan 02.

The mechanism for implementing regrouping in Cukilan 01 Public Elementary School refers to the Decree of the Minister of National Education No. 060 / U / 2012 concerning guidelines for establishing schools in article 26. The stages that are implemented relating to the implementation of regrouping at SD Negeri Cukilan 01 include data collection, socialization, stipulation, and school unification ..

The effectiveness of managing education in SD Negeri Cukilan 01 after implementing regrouping includes: (1) building maintenance and maintenance, (2) service for students, (3) management of facilities and infrastructure, (4) community participation, (5) unification of school culture.

The effectiveness of managing education in SD Negeri Cukilan 01 after implementing regrouping includes: (1) utilization of abandoned buildings, (2) leadership of principals, (3) management of education staff, (4) financial management, (5) position of committees.

The impact of regrouping on improving the quality of education in SD Negeri Cukilan 01 includes: (1) the impact on students appears to be more intimate social relations, increased student achievement both academically and non-academically, (2) the impact on teachers is seen in the familial relationship between teachers who are more familiar, the work climate is more pleasant and the teacher is more innovative, (3) the impact on the community is the implementation of PAUD, the establishment of the Nurul Huda Mosque and participation in extracurricular activities.

Conclusions from the results of the study indicate that the background and mechanism for implementing regrouping at SD Negeri Cukilan 01 are in accordance with existing regulations. Effectiveness, efficiency and the impact of regropuping in Cukilan 01 Elementary School have been in line with expectations.

Keywords: policy, regrouping

A. PENDAHULUAN

Latar belakang dilaksanakannya *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 dilatarbelakangi oleh persyaratan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 pasal 24 yang menyatakan: (a) penyelenggara sekolah tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, (b) jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan, (c) sekolah yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan jenisnya, (d) jarak antar sekolah yang diintegrasikn saling berdekatan dalam satu wilayah.

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Bupati telah lama menetapkan kebijakan regrouping secara bertahap untuk memperamping jumlah sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 423/0328.A/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penggabungan (*regrouping*) Sekolah Dasar Negeri Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Semarang. Berdasarkan peraturan tersebut Implementasi Kebijakan *regrouping* telah dilaksanakan di Kecamatan Suruh sejak tahun 2005. Berdasarkan SK Bupati no 423/0401/2005 tanggal 23 Mei 2005 telah diregroup tiga Sekolah Dasar yaitu SD Negeri Bonomerto 01, SD Negeri Ketangi 01 dan SD Negeri Medayu 01. Pada Tahun 2006 berdasarkan SK Bupati no 423/0526/2006 tanggal 9 Agustus 2006 diregroup dua Sekolah Dasar yaitu SD Negeri Cukilan 02 dan SD Negeri Plumpon 03.

Kegiatan penggabungan sekolah sampai saat ini masih berlangsung dan akan terus dilangsungkan hingga jumlah sekolah dirasa cukup guna peningkatan pelayanan pendidikan.

Regrouping di beberapa satuan pendidikan menjadi sebuah keharusan, ini dilakukan bukan sekedar alasan efektifitas belajar saja. Ada pertimbangan- pertimbangan yang mendasar yang menjadi aspek dilakukannya *regrouping* namun semua bakal bermuara pada mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik (Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Sugiarto, republika.co.id. Ungaran).

Berdasarkan penelitian Yulaikha di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada tahun 2005. Hasil penelitiannya memberikan sumbangan terhadap peningkatan mutu pendidikan di

wilayah tersebut, yaitu semakin membaiknya kinerja sekolah, kinerja guru, motivasi belajar siswa, prestasi sekolah, iklim kerja dan hubungan masyarakat sekitar. Namun ada satu aspek yang mengalami permasalahan yaitu aspek iklim kerja. Dampak lain pelaksanaan regrouping SD adalah pemanfaatan gedung SD. Secara umum seluruh bangunan SD yang digabung dimanfaatkan secara maksimal kecuali yang terjadi SD Wijirejo 01. Hal ini memperlihatkan bahwa penggabungan sekolah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sekolah. Hal tersebut ditunjukkan dengan efektivitas penggunaan gedung setelah adanya *regrouping* sekolah.

Dari data penggabungan dan pergantian nama Sekolah Dasar Negeri, di Kecamatan Suruh penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 yang merupakan hasil *regrouping* SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 sebab SD Negeri Cukilan 01 merupakan salah satu sekolah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan *regrouping*. Hal ini menarik dikaji mengingat sekolah yang baru melalui proses *regrouping* ada penyesuaian-penesuaian. Penyesuaian yang dimaksud tidak hanya berupa penyesuaian fisik dalam bentuk sarana prasarana, tenaga pendidik dan peserta didik, melainkan juga penyesuaian non fisik, mulai dari visi, misi dan tujuan sekolah, penyesuaian masing-masing budaya dan iklim kerja sekolah, serta penyesuaian struktur birokrasi dan pembagian wewenang.

Adapun berbagai alasan mengenai diadakannya *regrouping* dan pergantian nama sekolah dasar negeri adalah untuk efektifitas dan efisiensi kelembagaan dalam proses belajar mengajar pada tingkat sekolah dasar, seperti yang telah disebutkan dalam tujuan kebijakan. Harapan itu tentunya dapat terwujud seiring berjalannya waktu sebagai hasil dari tujuan kebijakan, seperti pendapat Van Meter dan Horn (Wibawa, 2014) bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dan swasta sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Harapan pemerintah Kabupaten Semarang dalam efektifitas dan efisiensi lembaga pendidikan jenjang sekolah dasar khususnya di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh diharapkan bisa berhasil.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REGROUPING SEKOLAH

Kebijakan menurut Dye (Subarsono, 2008 : 114) adalah “*public policy is whatever governments choose to do or not to do.*” Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan Tilaar (2008: 184), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan.” Dari pengertian kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian keputusan atau tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah dengan tujuan khusus untuk mengatasi suatu masalah atau urusan tertentu yang hasilnya memiliki dampak terhadap orang banyak. Pengertian kebijakan tersebut menunjukkan adanya kekuasaan pemerintah yang absolut dalam kebijakan, sehingga seluruh aktivitas kebijakan merupakan pilihan kebutuhan pemerintah. Pilihan kebutuhan pemerintah memberikan dampak bagi masyarakat, pada dasarnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat salah satunya melalui pendidikan. Tilaar (2008: 2) mengungkapkan bahwa, “kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.” Sedangkan menurut Arif Rohman (2009: 108), “kebijakan pendidikan merupakan kebijakan *public* yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.” Sementara itu, Riant Nugroho (2008: 37) menjabarkan bahwa “kebijakan pendidikan difahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan.” Kebijakan penggabungan sekolah (*regrouping*) yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Semarang No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 423/0328.A/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penggabungan (*regrouping*) Sekolah Dasar Negeri Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Semarang.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan, pemerintah mencanangkan kebijakan regrouping terutama untuk sekolah dasar. *Regrouping* atau penggabungan dalam dunia pendidikan berkaitan dengan perampingan jumlah sekolah. Jumlah sekolah yang cukup banyak dengan jumlah siswa yang kurang memadai berdasarkan standar nasional mengakibatkan pemborosan pembiayaan pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan alternatif perampingan sekolah dengan *regrouping*. Sedangkan penggabungan sekolah dasar menurut Sarwo Wibowo (2009: 47), “penggabungan Sekolah Dasar merupakan satu cara pengembangan sekolah dengan memberdayakan dan mengembangkan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan dan efektivitas sekolah.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penggabungan (*regrouping*) sekolah adalah proses menyatukan dua atau lebih sekolah guna mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Penggabungan (*regrouping*) sekolah yang dilaksanakan di negara kita didukung dengan berbagai peraturan baik peraturan pusat maupun daerah. Kebijakan regrouping yang selama ini dilaksanakan didukung oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan sekolah (*regrouping*) SD yaitu usaha penyatuan dua unit sekolah atau lebih menjadi satu kelembagaan/ institusi SD dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan. Dasar hukum *regrouping* diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pokok dalam mengupayakan pemerataan pendidikan dasar adalah melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama Sekolah Dasar, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dalam pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa pengintegrasian

sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah sejenis menjadi satu sekolah.

Adapun pertimbangan/kriteria yang harus dipenuhi dalam penggabungan sekolah dasar adalah: (1) Jumlah siswa sekolah dasar yang akan dihapus kemudian digabung secara keseluruhan kurang dari 120 siswa, (2) Jarak tempat tinggal terjauh dari siswa ke sekolah tujuan penggabungan tidak lebih dari 1.500 meter, (3) Jarak tempuh siswa dengan jalan kaki ke sekolah tujuan penggabungan maksimal 20 menit, (4) Jarak antara sekolah yang akan dihapus dan digabung dengan sekolah dasar tujuan penggabungan maksimal 2.000 meter, (5) Sekolah yang akan dihapus kemudian digabung berada dalam satu desa/kelurahan, dua desa/kelurahan atau lebih yang berdekatan, dan dalam dua kecamatan yang saling berbatasan, (6) Sekolah dasar tujuan penggabungan memiliki bangunan dengan kondisi fisik yang baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, dan faktor keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif sebagai mana terjadi di lokasi tersebut yang akan digunakan untuk menyusun laporan penelitian. Dengan metode ini peneliti dapat melihat secara obyektif program *regrouping* yang dihubungkan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan yang dijalankan, melihat sejauhmana tujuan *regrouping* tersebut tercapai, dan memperhatikan dampak dari penyelenggaraan program kebijakan *regrouping* dalam konteks secara umum tanpa harus dibatasi oleh tujuan khusus dari program kebijakan yang telah direncanakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat informatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Artinya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, namun bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan keadaan atau fenomena tentang pelaksanaan, faktor, dampak dan tujuan *regrouping*, efektifitas dan efisiensi dari program *regrouping* sekolah. Tempat penelitian di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Penelitian dilaksanakan antara bulan Oktober – Nopember 2018.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2007) “merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.” Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar di SD Negeri Cukilan 01, dokumen yang tersedia berbentuk tulisan yaitu: (1) peta sebaran Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Suruh, (2) peraturan *regrouping* yang berlaku, 3) daftar sekolah yang mengalami *regrouping*. (4) data rapat *regrouping*, (5) data mutasi siswa dan guru SD yang *diregrouping*, (6) Data kelulusan siswa, (7) daftar prestasi siswa, (8) Foto-foto .

2. Wawancara

Salah satu sumber informasi yang sangat penting ialah wawancara. Moleong (2009), “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 9 personal, yang terdiri dari: (1) Kasi Kursis SD Disdikbudpora Kabupaten Semarang, (2) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Suruh ketika pelaksanaan *regrouping*. (3) Pengawas TK/ SD Kecamatan Suruh ketika pelaksanaan *regrouping*, (4) Komite SD Negeri Cukilan 02 ketika pelaksanaan diregrouping. (5) Kepala SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 sebelum diregrouping. (6) Guru SD Negeri Cukilan 02 sebelum diregrouping, (7) Kepala SD Negeri Cukilan 01 saat ini.(8) Pemelola PAUD “Tunas Mulia”(9) Tokoh Masyarakat Desa Cukilan. Wawancara ini bertipe *open-ended*, di mana peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta - fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa *regrouping* SD Negeri Cukilan 01. Bahkan peneliti menanyakan pendapat pribadi responden tentang *regrouping* tersebut.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan menurut Nana Syaodih Sukmandinata (2005: 220) “merupakan satu teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.” Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap sekolah yang telah mengalami *regrouping*. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Cukilan 01. Pengamatan difokuskan pada kegiatan belajar mengajar setelah *regrouping* dilaksanakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Dilaksanakannya Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah

Latar belakang dilaksanakannya *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 mengacu pada persyaratan pada pasal 24 Keputusan Menetri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002, yaitu: (1) penyelenggara sekolah tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini SD Negeri Cukilan 02 dirasa kurang mampu melaksanakan penyelenggaraan pendidikan karena terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang hanya 3 orang guru kelas, ini jelas tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan layanan bagi siswa, untuk itu akan lebih efektif jika diregroup. (2) jumlah peserta didik kurang memenuhi persyaratan. Jumlah siswa di SD Negeri Cukilan 02 sebanyak 77 siswa, hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud no 17 tahun 2017 yang menyatakan bahwa jumlah peserta didik setiap rombongan belajar paling sedikit 20 dan paling banyak 28 siswa, (3) sekolah yang diintegrasikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya. Dalam hal ini SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 memiliki jenjang pendidikan yang sama yaitu Sekolah Dasar dengan rombongan belajar kelas 1 sampai kelas 6, (4) Jarak sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan atau dalam satu wilayah. SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 berada dalam satu wilayah dengan jarak hanya kira kira 200m. kedua sekolah tersebut berada dalam satu wilayah, hanya berjarak 200 m.

Selain pertimbangan di atas ada pertimbangan lain yang memperkuat alasan diregroupingnya kedua sekolah tersebut yaitu adanya kerusakan di beberapa ruang kelas baik

di SD Negeri Cukilan 01 maupun SD Negeri Cukilan 02, hal ini akan lebih efektif dalam perawatan gedung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Regrouping

Implementasi kebijakan *regrouping* yang dilaksanakan di SD Negeri Cukilan 01 bersifat sentralistik, yaitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, dilanjutkan ke UPTD Kecamatan, akhirnya ke lembaga sekolah dasar yang menjadi sasaran yaitu SD Negeri Cukilan 01. Dalam implementasi kebijakan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 letak pengambilan keputusan adalah Bupati Semarang. Mekanisme pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 mengacu pada Keputusan Menetri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002, pasal 26 tentang tatacara pengintegrasian sekolah negeri. Mekanisme implementasi kebijakan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 diawali dengan tahap interpretasi, pengorganisasian, sosialisasi, pelaksanaan.

a. Tahap Interpretasi

Dalam kebijakan ini berawal dari peraturan pusat baik berupa undnag-undang maupun permendiknas tentang penggabungan sekolah yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi lembaga sekolah khususnya tingkat pendidikan dasar, kemudian diturunkan ke daerah dan dibentuklah SK Bupati atau SK Walikota, dalam hal ini SK Bupati Semarang. Dari SK Bupati terbentuklah tim pelaksana kebijakan dan aturan dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri.

b. Tahap Pengorganisasian

Dalam implementasi kebijakan *regrouping* mengacu pada SK Bupati, dimana dalam SK Bupati tersebut telah terbentuk aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan dan juga pembentukan tim implementasi kebijakan. Meskipun pembentukan tim telah dibentuk dalam SK Bupati, tetapi untuk menjalankan itu semua perlu komunikasi yang terkondisikan dalam rapat dan musyawarah. Dengan adanya rapat, maka dalam bertindak telah terdapat rambu-rambu yang telah terorganisasikan.

c. Tahap sosialasasi

Tahap sosialisasi pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 menekankan pada pentingnya kebersamaan dan komunikasi. Dalam implementasi kebijakan *regrouping* mengacu pada SOP dan dalam menjalankan kegiatan didasari dengan komunikasi efektif dan musyawarah mufakat.

d. Tahap Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan sosialisasi langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 dilaksanakan oleh Kepala UPTD Kecamatan Suruh waktu itu melalui beberapa tahapan yaitu:

1) Pendataan

Pendataan dilakukan terhadap sekolah yang memenuhi kriteria diregroup. Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD Negeri Cukilan 02 memang memenuhi persyaratan untuk di *regrouping*, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuparen Semarang untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai penelitian Ika Purwaningsih (2014), melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar beserta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program *regrouping* sekolah dasar di

Kabupaten Purworejo tahun 2014. Dengan kesimpulan: implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar diawali dengan pendataan terhadap sekolah-sekolah dasar yang kemudian dipetakan berdasarkan skala prioritas oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah.

2) Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan kepada semua pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dengan tujuan agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman tentang manfaat *regrouping* bagi semua pihak terutama bagi peserta didik. Sosialisasi pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 dilaksanakan padahari Jumat tanggal 23 Juni 2006 di Balai Desa Cukilan. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh peneliti, sosialisasi dihadiri beberapa pemangku kepentingan yaitu: kepala sekolah, para guru, pengurus komite, Kepala UPTD, Pengawas Sekolah, Camat, Kepala Desa beserta perangkatnya LKMD, BPD, dan Tokoh Masyarakat, semua berjumlah 30 orang. Dalam kegiatan sosialisasi dibahas tentang rencana penempatan tenaga kependidikan sekolah yang ditinggalkan, rencana penyebaran siswa dan pengelolaan sarana prasarana serta penetapan sekolah yang akan digunakan setelah *regrouping* dilaksanakan. Dalam tahap ini berjalan dengan lancar tidak ada gejolak baik dari orang tua maupun para guru semua bisa menerima. Hal ini sesuai dengan penelitian Ika Purwaningsih (2014) yang menyatakan bahwa hasil pemetaan menjadi dasar untuk melakukan sosialisasi terhadap sekolah untuk menentukan sekolah sasaran *regrouping*. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Budiyono (2011) bahwa Proses sosialisasi kebijakan merger SDN memerlukan sikap kooperatif dan partisipatif stakeholders pendidikan SDN, baik yang digabung maupun digabung, sehingga dua kepentingan dapat dikelola dan dicapai dengan baik, yakni penerimaan atas isu kebijakan dan kesepakatan atas pengelolaan aset. Perlunya pedoman pelaksanaan *regrouping* yang memuat tiga item penting, yakni: tatalaksana pengelolaan sarana dan prasarana, aset perlengkapan, ruang, dan bangunan SDN yang digabungkan, tatalaksana penggabungan peserta didik, dan tatalaksana proses pembelajaran yang melibatkan dua kelompok guru yang semula berbeda sekolah.

3) Penetapan

Dalam tahap ini ada perbedaan pendapat dari dua pihak. Dari pihak desa menghendaki sebagai SD induk *regrouping* adalah SD Negeri Cukilan 01 dengan pertimbangan yang pertama gedungnya masih lebih baik, lingkungannya memenuhi syarat untuk tempat pendidikan dimana di depannya ada lapangan sepak bola yang luas. Di pihak yang lain punya pandangan bahwa SD Cukilan 02 adalah tempat yang terbaik untuk tempat pendidikan, karena lahannya masih luas lebih strategis karena berada di tepi jalan. Dari perbedaan pendapat dilakukan diskusi di balai desa Cukilan yang intinya saling berargumentasi untuk perbaikan pendidikan. Dari pihak desa menginginkan sekali agar SD induknya adalah SD Negeri Cukilan 01, di lain pihak juga bersikukuh bahwa SD yang terbaik yang menjadi tempat pendidikan adalah SD Cukilan 02. Karena diskusi yang panjang yang tidak menemukan titik temu akhirnya kepala UPTD turun tangan sebagai mediasinya akhirnya diperoleh kesepahaman dari kedua belah pihak bahwa SD yang dijadikan final untuk lokasi SD Induk adalah SD Cukilan 02 tetapi dengan nama SD Negeri Cukilan 01 dengan pertimbangan: 1) SD Negeri Cukilan 02 memiliki lahan yang lebih luas sehingga sangat mudah untuk dilakukan pengembangan yang mendukung kegiatan pembelajaran, 2) tempatnya lebih strategis karena berada di tepi jalan raya, 3) lebih dekat dengan SMP, 4)

Beberapa ruang kelas yang rusak diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah. Setelah masalah penetapan sekolah dapat diselesaikan timbul perbedaan pendapat yang kedua yaitu tentang pemanfaatan gedung SD Cukilan 01 yang akan ditinggalkan. Dari pihak desa menginginkan untuk digunakan gedung pertemuan sedang dari pihak yang lain menginginkan untuk pendirian PAUD. Berdasarkan musyawarah akhirnya sepakat untuk digunakan pendirian PAUD. Penelitian Ika Purwaningsih (2014) melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan regrouping sekolah dasar beserta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program regrouping sekolah dasar di Kabupaten Purworejo tahun 2014. Dengan kesimpulan: a) implementasi kebijakan *regrouping* sekolah dasar diawali dengan pendataan terhadap sekolah-sekolah dasar yang kemudian dipetakan berdasarkan skala prioritas oleh tim penghapusan dan penggabungan sekolah.

4) Penyatuan

Setelah penetapan sekolah selesai dan mendapatkan kesepakatan sebagai SD induk semua siswa dan sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Cukilan 02 diserahkan semua ke SD Negeri Cukilan 01, mengenai tenaga kependidikaanya diadakan penataan dan pemerataan dengan prioritas tercukupinya dulu tenaga pendidik di SD Negeri Cukilan 01. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 (1)

SD Negeri Cukilan 01 merupakan sekolah yang berhasil mengimplementasikan kebijakan *regrouping*, Ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang dibawa oleh implementasi kebijakan regrouping di SD Negeri Cukilan 01 telah memenuhi derajat perubahan yang diinginkan, baik perubahan fisik maupun non fisik. Perubahan secara fisik terlihat dalam segi pembelajaran, hubungan antar guru, penambahan sarana prasarana akibat penggabungan dua lembaga, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada kondisi yang lebih baik seiring bertambahnya jumlah murid sehingga memudahkan sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan, adanya satu kepemimpinan, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, antusias orang tua dan masyarakat bertambah, minat belajar dan prestasi siswa semakin meningkat. Perubahan secara non fisik terlihat dari beban kerja guru lebih ringan karena tercukupinya tenaga pendidik, iklim kerja menyenangkan, hubungan silaturrahmi antar guru lebih luas, dan guru lebih berinovasi.

3. Efektifitas Pengelolaan Pendidikan di SD Negeri Cukilan 01

a. Pemeliharaan dan Perawatan Gedung

Dengan ditetapkannya SD Negeri Cukilan 02 sebagai SD induk pemerintah cukup melakukan perbaikan terhadap satu sekolah saja yaitu SD Negeri Cukilan 02 ini lebih efektif dan efisien karena tidak terjadi pemborosan biaya bagi perawatan gedung. Sedang SD Negeri Cukilan 01 lama 2 ruang yang masih bagus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.Hal ini sesuai dengan Penelitian Yulaikha, (2005) di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya bahwa dampak lain pelaksanaan regrouping SD adalah pemanfaatan gedung SD. Secara umum seluruh bangunan SD yang digabung dimanfaatkan secara maksimal kecuali yang terjadi SD Wijirejo 0I. Hal ini memperlihatkan bahwa penggabungan sekolah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sekolah.

b. Layanan Bagi Siswa Lebih Optimal

Setelah adanya penyatuan siswa akibat dari regrouping jumlah siswa menjadi semakin banyak namun diimbangi pula dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup pula karena adanya penggabungan dari dua sekolah sehingga pelayanan bagi siswa baik pelayanan bimbingan maupun pembelajaran bisa lebih optimal yang pada perkembangannya prestasi siswa terus meningkat hingga saat ini.

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sumber peralatan atau sarana prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan *regrouping* adalah dengan menggabungkan semua sarana prasarana yang ada di dua lembaga, yaitu di SD Negeri Cukilan 01 dan di SD Negeri Cukilan 02 sehingga akan lebih menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan peneliti jumlah sarana dan prasarana yang diserahkan ke SD negeri Cukilan 01 sejumlah 40 macam, (DV.5), sedangkan dokumen seperti stempel, buku induk dan sertifikat / piagam Status Sekolah sesuai ketentuan diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan setempat yaitu UPTD Pendidikan Kecamatan Suruh (DV.1) Hal ini sesuai dengan Penelitian Puji Waluyo, (2014) yang dilakukan di SD Undaan Tengah 01 Kudus. Dampak positif dalam pengelolaan tenaga pendidikan khususnya guru, pengembangan kelas paralel, pengelolaan dana, pengelolaan sarana prasarana utamanya terkait dengan buku dan perabot sekolah

d. Partisipasi Masyarakat Meningkat

Partisipasi masyarakat setelah dilaksanakan regrouping yang pertama adanya "mushola" Nurul Huda yang dibangun pada tahun 2007 yang sepenuhnya atas kerja sama komite, masyarakat dan orang tua dan merupakan satu satunya musholla milik SD di Kecamatan Suruh yang diresmikan oleh Bupati Semarang bapak H. Bambang Guritno, SE, ME. Pada tanggal 14 April 2007. Terdapat pada Lampiran Gambar 29. Dengan adanya musholla di SD Negeri Cukilan 01 sangat bermanfaat bukan hanya untuk siswa dan guru sebagai sarana pembelajaran yang berkaitan dengan pelajaran agama Islam tetapi juga bagi masyarakat sekitar untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah dan kegiatan keagamaan yang kedua, masyarakat Desa Cukilan identik dengan seni tradisional kontolan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti kegiatan ini dimanfaatkan sekolah untuk berkolaborasi dengan siswa dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta melatih siswa, dalam event tertentu anak-anak tampil baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan sekolah, misalnya dalam acara saparan desa secara rutin setiap tahun. Yang ketiga adanya pendirian PAUD "Tunas Mulia" berdiri pada tanggal 1 September 2006 diresmikan oleh bapak kepala dinas kabupaten Semarang waktu itu yaitu Bapak Nuryanto sebagai pengelola adalah bapak Heri Suwarto, S.Pd.M.Pd salah satu guru SD Negeri Cukilan 01 waktu itu dengan penanggungjawab Ibu Ida Faiza Zulva. Ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru turun pada tanggal 23 Desember 2014 sesuai dengan Surat Keputusan no 421.9/3476/nomor reg188/PAUD/2014, dengan NPSN 69875126 (DIV.39-40)

e. Penyatuan Budaya Sekolah

Budaya sekolah yang juga sebagai kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 sebelum di *regrouping* dapat di padukan untuk dilaksanakan pemberian bilamana diperlukan. Contoh budaya sekolah tersebut misalnya tata tertib yang berlaku bagi siswa serta kegiatan pembiasaan misalnya budaya 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) dan senam pagi bersama setiap hari Jumat, dan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian Yulaikha di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada tahun 2005. Hasil penelitiannya memberikan sumbangsih terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut, yaitu semakin membaiknya kinerja sekolah, kinerja guru, motivasi belajar siswa, prestasi sekolah, iklim kerja dan hubungan masyarakat sekitar. Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwa Wibawa (2009) mengenai dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiensi, keefektifan, produktifitas dan pelayanan pendidikan di SD Teruman Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak penggabungan sekolah dilihat dari efisiensi penggunaan dana yang dimiliki sekolah sudah tergolong efisien. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa penghematan alokasi dana yang dimiliki SD Teruman yakni alokasi dana untuk gaji guru, untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk pengembangan profesionalitas guru menjadi lebih kecil setelah adanya penggabungan sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada SD Bantul Manunggal terjadi penghematan alokasi dana untuk pengembangan sarana dan prasarana setelah penggabungan sekolah. Pelayanan pendidikan yang semakin merata setelah penggabungan dilihat dari pemerataan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang semakin menjangkau semua kalangan, usia, dan jarak

4. Efisiensi Pengelolaan Pendidikan Setelah Regrouping

a. Pemanfaatan Gedung yang Ditinggalkan

Di lokasi SD Negeri Cukilan 01 yang lama tampak berdiri 2 ruang gedung PAUD “Tunas Mulia” dan 1 ruang agak kecil untuk kantor guru. Pendirian PAUD “Tunas Mulia” di Desa Cukilan ini memanfaatkan gedung yang ditinggalkan penghuninya karena menyatu dengan SD negeri Cukilan 02. Ini lebih efektif daripada mendirikan gedung baru.

b. Adanya Satu Kepemimpinan

Sebelum dilaksanakan regrouping SD Negeri Cukilan 02 kepemimpinan kepala Sekolah dijabat oleh Bp Romadhon S.Pd sejak tahun 2002. Pada Tahun 2004 Bp Romadhon S.Pd diberi tugas tambahan mengampu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Cukilan 01 karena kepala SD Negeri Cukilan 01 memasuki masa purna. Sehingga sejak tahun 2004 Bp Romadhon, S.Pd mengelola dua sekolah dengan manajemen yang berbeda. Setelah diregroup Bp Romadhon, S.Pd ditetapkan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Cukilan 01 sebagai SD induk.

c. Pengelolaan Tenaga Kependidikan

Setelah SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 diregroup dilaksanakan penataan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Bagi sekolah yang semula kekurangan tenaga pengajar dengan adanya regrouping terjadi pemerataan guru. Ada beberapa guru baik dari SD Negeri Cukilan 01 dan SD negeri Cukilan 02 yang di mutasi dengan alasan penataan dan pemerataan, diantaranya Pak Suharto dari SD Negeri Cukilan 01 di mutasi ke SD Negeri Dadapayam 03, karena Bu Titik Sugiarti (istri pak Suharto yang akan menggantikan beliau di

SD Negeri Cukilan 01. Pak Sukedi di mutasi ke SD Tegalrejo Salatiga berdekatan dengan tempat tinggalnya, ibu Nur Cahyaningsih mutasi ke salah satu SD di Banyubiru berdekatan dengan rumahnya, dan Pak Sumarno di mutasi sebagai penjaga sekolah di SD Negeri Krandon lor 01.

d. Pengelolaan Keuangan

Dengan digabungnya siswa SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi bertambah seiring bertambahnya jumlah murid sehingga memungkinkan sekolah untuk melakukan berbagai kegiatan. Efisiensi pengelolaan keuangan setelah regrouping tampak pula pada penghematan honor guru kegiatan ekstrakurikuler biaya pengembangan profesionalisme guru menjadi lebih kecil, Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwa Wibawa (2009) mengenai dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiensi, keefektifan, produktifitas dan pelayanan pendidikan di SD Teruman Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak penggabungan sekolah dilihat dari efisiensi penggunaan dana yang dimiliki sekolah sudah tergolong efisien.

e. Adanya Penyatuan Komite

Adanya penyatuan komite pasca regrouping SD Negeri Cukilan 01 dan SD Negeri Cukilan 02 menyatu pula gagasan-gagasan atau ide baru untuk kemajuan sekolah selanjutnya, misalnya gagasan pendirian mushola yang terealisasi pada tahun 2007 merupakan kerjasama sepenuhnya masyarakat dan orang tua, Hal ini sesuai dengan Penelitian Puji Waluyo, (2014) yang dilakukan di SD Undaan Tengah 01 Kudus. Dampak positif dalam pengelolaan tenaga pendidikan khususnya guru, pengembangan kelas paralel, pengelolaan dana, pengelolaan sarana prasarana utamanya terkait dengan buku dan perabot sekolah dan penyatuan komite sekolah.

5. Dampak Implementasi Kebijakan Regrouping

a. Dampak yang diinginkan (*intended impact*)

Dampak yang diinginkan tampak pada siswa baik dari siswa SD yang digabung maupun dari siswa SD induk. Dari segi hubungan sosial tidak menimbulkan masalah yang berarti karena jauh sebelum diregroup hubungan antar siswa sebagian besar sudah saling mengenal sehingga siswa lebih mudah beradaptasi. Dilihat dari kegiatan pembelajaran tampak adanya peningkatan kualitas, baik akademis maupun non akademis sejak diregroup hingga saat ini. Prestasi akademis bisa dilihat dari prestasi kelulusan siswa. Sejak diregrouping sampai saat ini kelulusan siswa selalu 100% dan selalu menduduki peringkat 10 besar. Sedangkan prestasi non akademis tampak dari kejuaraan yang selalu diraih dalam kegiatan lomba siswa baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi. Hal ini sesuai dengan penelitian Sudiyono dkk, (2007) yang dilaksanakan di SD Pakem 01 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman bahwa dampak regrouping bagi siswa pada awalnya memang agak sulit beradaptasi tetapi dengan berbagai upaya yang dilakukan guru melalui pembinaan akhirnya siswa dapat menyatu dengan baik.

Dampak dari guru terlihat adanya iklim kerja yang lebih baik, terjadi persaingan kerja yang positif dan guru lebih berinovasi, hubungan kekeluargaanpun lebih akrab, iklim kerja lebih menyenangkan, hal ini dapat dilihat oleh peneliti ketika melaksanakan observasi penelitian. Hal ini sesuai dengan penelitian Sudiono dkk (2007) yang dilaksanakan di SD

Pakem 01 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman bahwa dampak *regrouping* bagi guru sangat membantu tugas guru karena saat yang bersamaan ada tiga guru yang purna tugas.

Dampak yang diinginkan dari masyarakat tampak adanya pembangunan musholla” Nurul Huda” di SD Negeri Cukilan 01. Musholla tersebut merupakan inisiatif dari komite yang didukung oleh orang tua dan masyarakat yang terrealisasi pada tahun 2007 atas swadaya sepenuhnya dari masyarakat sedang di lokasi SD Cukilan 01 lama tampak adanya Gedung PAUD” Tunas Mulia” yang juga diselenggarakan oleh masyarakat, kolaborasi seni tradisional kontolan yang masih berlangsung sampai saat ini dan kegiatan ekstrakurikuler qiroah yang dibina oleh alumni.

b. Dampak yang tidak diinginkan (*unintendet impact*)

Dampak yang tidak diinginkan tampak pula dalam pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 meskipun dalam skala kecil dan tidak berlangsung lama. Dampak tersebut yang tampak dari siswa adalah: 1) adanya penurunan prestasi bagi beberapa siswa yang tergolong pandai karena dengan bertambahnya jumlah siswa persaingan terhadap prestasi semakin ketat, 2) tidak semua siswa bisa menerima kebijakan *regrouping*. hal ini justru menjadikan menurunnya semangat belajar siswa.

Dampak yang tidak diinginkan juga terjadi pada sebagian kecil guru, ada yang merasa kurang nyaman dengan situasi baru sehingga mempengaruhi semangat mengajar, namun hal ini tidak berlangsung lama pada akhirnya semua bisa neradaptasi dengan baik.

Kondisi SD Negeri Cukilan saat ini jumlah siswa 163, terdapat pada Lampiran 1. Jumlah tenaga pendidik 13, terdapat pada Lampiran 9. Dilihat dari jumlah siswa SD Negeri Cukilan 01 menempati urutan ke lima dari jumlah SD Negeri Kecamatan Suruh, terdapat pada Lampiran1. Saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah ibu Soidah, S.Pd.SD. Keberhasilan pembelajaran di SD Negeri Cukilan 01 saat ini salah satu faktor adalah kepemimpinan kepala sekolah yang mampu mengelola manajemen sekolah dan mampu berperan sebagai motivator dan inovator bagi para guru gurunya. Ibu Soidah, S.Pd menerapkan kerja tim, semua guru diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya. Prestasi siswa banyak diraih, terbukti dari berbagai kegiatan lomba yang diikuti sering memperoleh kejuaraan bukan hanya di tingkat kecamatan melainkan sampai di kabupaten bahkan propinsi yaitu lomba LCC pada tahun 2016. Tingkat kelulusan siswa selalu 100% dengan peringkat kelulusan siswa selalu 10 besar.terdapat pada lampiran 10 Kegiatan ekstrakurikuler juga berjalan dengan baik. Yaitu kegiatan pramuka yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib, olah raga, seni tari dan qiroah.

Saat ini SD Negeri Cukilan 01 berkedudukan sebagai SD inti Gugus Dahlia yang membawahi 6 SD imbas di wilayah utara. Sebagai SD inti SD Negeri Cukilan 01 berperan sebagai motor penggerak lewat kegiatan KKG. Pada tahun 2018 SD Negeri Cukilan 01 ditetapkan sebagai SD inti Rintisan K 13 dengan 11 SD imbas di wilayah Kecamatan Suruh. Sehingga pada tahun ajaran 2018-2019 SD Negeri Cukilan 01 melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, yaitu pembelajaran Tematik untuk kelas I dan IV, pembelajaran bidang studi untuk kelas II, III, V dan VI. Dalam melaksanakan pembelajaran SD Negeri Cukilan 01 mengacu pada visi dan misi serta slogan sekolah yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik dan lingkungan, kegiatan pembelajaran, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana, dan penerapan budaya sekolah. Kondisi fisik berupa bangunan semua dalam kondisi baik. Tahun pelajaran 2018-2019 SD Negeri Cukilan 01 melaksanakan pembelajaran dengan Kurikulum K 13 bagi kelas 1 dan 4 untuk kelas yang lain masih menggunakan KTSP. Observasi dan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas dilaksanakan pada tanggal 12 dan 14 Oktober 2018, Kelas I diampu oleh Bu Amiroh, S.Pd.SD sedang melaksanakan pembelajaran Tema 4 Subtema 3. Kelas 2 sedang melaksanakan pembelajaran agama Islam yang diajar oleh Bapak Ridwan, S.Pd I dengan materi hidup rukun. Kelas 3 diampu oleh Ibu Titik Handayani, S.Pd sedang melaksanakan pembelajaran Matematika tentang alat ukur. Kelas 4 diampu oleh ibu Rica Widowati, S.Pd sedang melaksanakan pembelajaran Tema 4 Subtema 2 tentang bangun ruang. Kelas 5 diampu oleh Ibu Titik Sugiarti, S.Pd waktu peneliti melakukan pengamatan pembelajaran di kelas 5 ibu Titik Sugiarti, S.Pd sedang ada kepentingan di luar, anak – anak belajar Ilmu Pengetahuan alam. Kelas 6 diampu. Oleh ibu Muntamah Maanis, S.Pd sedang melaksanakan pembelajaran PKN tentang Lembaga Negara. Pengelolaan kegiatan sekolah di SD Negeri Cukilan 01 sepenuhnya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dan tidak menarik lagi pungutan lagi dari orang tua siswa. Besarnya uang yang diterima saat ini adalah Rp 800.000 / siswa / tahun. Yang memegang keuangan selaku bendahara BOS di SD Negeri Cukilan 01 saat ini adalah Bapak Ridwan. Pengelolaan keuangan BOS mengacu pada juknis yang ada di bawah pengawasan kepala sekolah. Sarana prasarana yang ada di SD Cukilan 01 saat ini diantaranya meliputi buku buku pembelajaran kurikulum 2013 untuk kelas 1 dan 4 dan buku pembelajaran KTSP untuk kelas 2,3 5 dan 6 satu anak satu buku , peralatan olah raga meliputi bola basket, bola sepak, bola voly, Kit IPA, peraga Matematika, globe, peralatan UKS ,timbangan badan, pakaian kostum siswa, dan lain lain.

Penerapan budaya sekolah sebagai kegiatan pembiasaan di SD Negeri Cukilan 01 diantaranya melaksanakan sholat dhuhur berjamaah, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan senam pagi setiap jumat pagi.

E. PENUTUP

Proses implememtasi kebijakan *regrouping* yang dilaksanakan di SD Negeri Cukilan 01 Kecamatan Suruh pada tahun 2006 melibatkan beberapa SKPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, BKD, BKUD, Dewan Pendidikan dan PU. Proses implementasi kebijakan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Suruh. Adapun tahapan pelaksanaan *regrouping* meliputi: 1) tahap onterpretasi, kebijakan *regrouping* berawal dari Undang- Undang dan peraturan pusat yang selanjutnya diturunkan menjadi SK bupati. 2) tahap pengorganisasian, kebijakan *regrouping* dinyatakan dengan pendapat tim implementator yang mengacu pada SK Bupati, 3) tahap sosialisasi , kebijakan *regrouping* menekankan pada kebersamaan dan komunikasi efektif. Pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 dilaksanakan oleh Kepala UPTD Pendidikan yang dimulai dari pendataan, sosialisasi, penyatuhan dan penetapan sekolah.

Pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 berjalan dengan baik dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mekanisme pelaksanaan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 pada awalnya mengalami sedikit kendala namun pada akhirnya semua bisa teratasi. Respon sekolah, orang tua dan masyarakat dalam menanggapi implememtasi kebijakan *regrouping* di SD Negeri Cukilan 01 cukup baik.

SD Negeri Cukilan 01 merupakan SD yang mampu melaksanakan implementasi kebijakan *regrouping*. Keberhasilan tersebut diantaranya karena didukung oleh peran kepala sekolah yang aktif dalam menyatukan dua lembaga yang berada di satu wilayah dalam satu kepemimpinan. Peran kepala sekolah sebagai motivator dan inovator terus berkesinambungan sampai saat ini

Perubahan yang dibawa oleh implementasi kebijakan *regrouping* telah terpenuhi baik secara fisik maupun non fisik.. Perubahan secara fisik terlihat dalam segi pembelajaran, hubungan antar guru, penambaham sarana prasarana akibat penggabungan dua lembaga, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengarah pada kondisi yang lebih baik seiring bertambahnya jumlah murid sehingga memudahkan sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan, adanya satu kepemimpinan, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, antusias orang tua dan masyarakat bertambah, minat belajar dan prestasi siswa semakin meningkat. Perubahan secara non fisik terlihat dari beban kerja guru lebih ringan karena tercukupinya tenaga pendidik, iklim kerja menyenangkan, hubungan silaturrahmi antar guru lebih luas, dan guru lebih berinovasi. Efektifitas, efisiensi dan dampak *regrouping* bagi pengelolaan pendidikan di SD Negeri Cukilan 01 telah tercapai. Efektifitas penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah 1) pemeliharaan dan perawatan gedung, 2) pelayanan pembelajaran bagi siswa, 3) penyatuan budaya sekolah, 4) partisipasi masyarakat, 5) pemanfaatan sarana dan prasarana. Sedang efisiensi penelenggaraan pendidikan setelah *regrouping* misalnya, 1) pemanfaatan gedung yang ditinggalkan, 2) pemenuhan tenaga kependidikan, 3) pengelolaan keuangan, 4) adanya satu kepemimpinan, 5) adanya penyatuan komite.

Tujuan implememtasi kebijakan *regrouping* yaitu efektifitas dan efisiensi telah tercapai baik dari siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang terus berkembang menjadi lebih baik, sehingga SD Negeri Cukilan 01 menjadi salah satu SD favorit di Kecamatan Suruh.

Dampak implememtasi kebijakan *regrouping* yang diharapkan terbukti dengan upaya kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, komite serta dukungan masyarakat dan orang tua berhasil menjadikan SD Negeri Cukilan 01 sampai saat ini menjadi sekolah yang memiliki prestasi yang baik di bidang akademis maupun non akademis. Implementasi kebijakan *regrouping* telah memberi dampak yang positif bagi siswa, guru maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyono. 2011."Kajian Implementasi Kebijakan Regrouping SDNegeri di KotaBekasi"
Region Volume III. No. 1 (Maret 2011) diakses dari: <https://empiris.uns.ac.id>

Dye (Subarsono 2008: 114) *public policy is whatever governments choose to do or not to do.*

Dolbeare, M Editor, (1975) Public polcy Evaluation, Volume II,London, Sage publications.

Fowler, Frences G. 2004. *Policy Studies For Educational Leaders AnIntroduction Second Edition.* New Jersey: Merrill Prentice Hall

Fatah, 2009. Ekonomi dan Pembiayaan pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya

Ferina, Tefany dan Setyowati, Sri.2016”Implementasi Kebijakan Regrouping (Studi Kasus di SD Negeri Banjarsari 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro).”*Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Unesa Surabaya.*

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press*

Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 423/0328.A/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar Negeri Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Semarang.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang *Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah (Regrouping) SD.* Jakarta: Kemendagri.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang *Pedoman Pendirian Sekolah.* Jakarta: Kemendiknas.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif:* Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhajir, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif,Yokyakarta : Rake Sarasin.

Nugroho Riant, 2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, Dan Strategi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nana Shaodih Sukmadinoto, 2005: 220. Metoda Penelitian Penelitian Bandung Remaja Rosdakarya.

Oemi Abdurrohman ,1995: 113. *Public relation* Bandung. Alumni

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 pasal 24 tentang jumlah rombongan belajar di jenjang sekolah dasar.

Purwaningsih, Ika. 2014. “Implementasi Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten Purworweo,” *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY.*diakses dari:<https://empiris.uny.ac.ad/16644/1/ika>

Prihtiani, Ani. 2009.Kompas. Com

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 56 tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Provinsi Jawa tengah no 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Semarang No. 28 Tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Semarang*.
- Rohman Arif, 2009: 108. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang .
- Surat Keputusan Bupati Semarang no 423/0526/2006 tentang Penetapan Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri kabupaten Semarang
- Surat Keputusan Bupati Semarang no 423/0401/2005 tentang Penetapan Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri kabupaten Semarang.
- Sutopo, H. B, 2005, Metodologi Penelitian Surakarta, sebelas Maret university Pres.
- Sugiarto (Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang), 2014 Regrouping Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang Satu Langkah dalam Penataan dan Pemerataan Guru. Diakses : (<https://prioritaspendidikan.org.detail>)
- Suwarto. 2016. “Manajemen Konflik Sekolah Regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta”. Jurnal Varia Pendidikan Vol. 28 No. 2
- Sarwa Wibawa. 2009. “Dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiensi, keefektivan, produktivitas, dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bantul”. Tesis.PPs UNY.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono, Mada Sutapa, & Nurtanio Agus Purwanto. 2009. “Dampak Regrouping Sekolah Dasar Kasus SD Pakem 01 di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman”. Diakses (<http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian>)
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto. 2014. *Penggabungan Sekolah di kabupaten Semarang disebut demi mutu*. Republika .co.id Ungaran. Diakses (<https://republika.co.id>)
- Siagian, 2011 Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan
- Tilaar, H.A.R. 2004.*Pradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rienka Cipta.
- Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Terry , 1974; 117, *Principle of management homewoog Illions* : Richard D.Irwin.Ina.
- Undang – Undang Republik Indonesia no 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional*
- Van meter dan Horn (Wibawa 2014) Implementasi Kebijakan publik : *policy implementation proces*

Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino , 2006: 139. Implementasi Kebijakan Publik : *policy implementation proses.*

Widiowati, Rani. 2012. “Kebijakan Regrouping dan Resiliensi Sekolah Paska Erupsi Merapi di SD Negeri Umbulharjo 2.” Jurnal Sosiologi Pendidikan UNY.

Wibawa, S. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Waluyo, Puji, 2004. Pelaksanaan Program Regrouping Sekolah Dasar Undaan Tengah Kecamatan Undaan, Kudus. Tesis, UNS surakarta. (diakses dari:<https://digliib.uns.ac.id>)

Yulaikha ,2005“Dampak Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”

Yuliana, 2005 Pelaksanaan regrouping di Kecamatan Minggir kabupaten Sleman, Kajian Kasus, SD Balangan 01 dan SD sendangrejo, Sripsi, FIP UNY
(diakses dari : <https://repository.usu.ac.id>)

Yoyon Bahtiar Irianto. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model.* Jakarta: Rajawali Press